



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Khusus - Calon PN)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)

UNIT KERJA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AULIA RAHMAN BASRI
2. Jabatan : CALON BUPATI
3. NHK : 769772

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 580.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/120 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.320.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI COLT DIESEL FE SHD / BAK KAYU Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI COLT DIESEL / BAK KAYU Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ / MOPEN Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.500.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 20.578.967

F. HARTA LAINNYA Rp. 8.195.000.000

Sub Total Rp. 10.128.078.967

III. HUTANG Rp. 7.054.080.837

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.073.998.130

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.